SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MENGGERAKKAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA MULYA ABADI DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Jesica Aprilliana Clara
E1031221052

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MENGGERAKKAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA MULYA ABADI DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Jesica Aprilliana Clara
E1031221052

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MENGGERAKKAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA MULYA ABADI DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Jesica Aprilliana Clara
E1031221052

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ir. Hj Ida Rochmawati, M.Si Tanggal: 7 Mei 2026
NIP 1968082520070120

Dosen Pembimbing Pendamping

Ade Risna Sari, S.H, M.Si Tanggal: 28 April 2026
NIP 197309302025212009

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MENGGERAKKAN BADAN USAHA MILIK DESA JAYA MULYA ABADI DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
Jesica Aprilliana Clara
NIM.E1031221052

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Kamis / 4 Juni 2026
Waktu : 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang R3

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Ir. Hj Ida Rochmawati, M.Si	Ade Risna Sari, S.H, M.Si
NIP. 19680825200701201	NIP. 197309302025212009
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Pardi, S.Sos., M.AB	Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP. 197209052002121003	NIP. 198805072014041002

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Pemerintah Desa dalam menggerakkan Badan Usaha Milik Desa Jaya Mulya Abadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, pengurus BUM Desa, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi belum berjalan secara optimal. Pada fungsi pelayanan, pemerintah desa belum sepenuhnya memberikan pendampingan administratif dan operasional secara maksimal. Pada fungsi pembangunan, pengembangan unit usaha belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada fungsi pemberdayaan, program pelatihan dan pembinaan belum direalisasikan secara optimal. Sementara pada fungsi pengaturan, proses legalitas dan administrasi BUM Desa masih dalam tahap penyempurnaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa belum optimalnya fungsi Pemerintah Desa dalam aspek pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan menyebabkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi belum mampu beroperasi secara maksimal sebagai lembaga ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aktif pemerintah desa dalam pembinaan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan BUM Desa agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Fungsi Pemerintahan, BUM Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Village Government in mobilizing and supporting the operation of Jaya Mulya Abadi Village-Owned Enterprise (BUM Desa) in Sukamulya Village, Parindu District, Sanggau Regency. This research employed a qualitative, descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village government officials, BUM Desa administrators, and community members as informants. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which included data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Village Government has not optimally mobilized Jaya Mulya Abadi BUM Desa. In terms of the service function, the village government has not fully provided adequate administrative and operational assistance. Regarding the development function, the expansion of business units has not progressed in accordance with the established plans. In the empowerment function, training and capacity-building programs have not been implemented effectively. Meanwhile, in the regulatory function, the BUM Desa's legal and administrative processes are still undergoing refinement. The study concludes that the suboptimal performance of the Village Government in service, development, empowerment, and regulation has hindered Jaya Mulya Abadi BUM Desa from functioning effectively as a village economic institution. Therefore, a stronger, more active role for the Village Government is needed to foster, mentor, and strengthen BUM Desa's institutional capacity to enhance its contribution to community welfare.

Keywords: Village Government, Government Functions, Village-Owned Enterprise (BUM Desa).

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara regulatif, pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya adalah BUM Desa yang telah terbentuk secara legal tetapi belum beroperasi secara optimal. Hal ini juga terjadi pada BUM Desa Jaya Mulya Abadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Surat Keputusan Kepala Desa, serta didukung oleh perencanaan dalam dokumen RPJMDes, pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa tersebut belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan, regulasi, dan implementasi di lapangan, yang diduga berkaitan dengan belum optimalnya fungsi Pemerintah Desa dalam menggerakkan BUM Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa fungsi Pemerintah Desa Sukamulya dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi belum berjalan secara optimal. Pada aspek fungsi pelayanan, pemerintah desa belum sepenuhnya memberikan pendampingan administratif dan operasional kepada pengurus BUM Desa secara berkelanjutan. Pada fungsi pembangunan, pengembangan unit usaha belum terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dokumen perencanaan desa.

Selanjutnya, pada fungsi pemberdayaan, program pelatihan dan pembinaan yang direncanakan belum direalisasikan secara maksimal, sehingga kapasitas pengurus BUM Desa masih terbatas. Sementara itu, pada fungsi pengaturan, proses legalitas dan administrasi BUM Desa masih berada dalam tahap perbaikan dan belum sepenuhnya tuntas, termasuk dalam proses pendaftaran badan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sukamulya belum menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan secara optimal dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi. Akibatnya, BUM Desa belum mampu beroperasi secara maksimal sebagai lembaga ekonomi desa yang seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan antara perencanaan, regulasi, dan implementasi menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek tata kelola dan penggerakan kelembagaan oleh pemerintah desa.

Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa Sukamulya meningkatkan peran aktifnya dalam menggerakkan BUM Desa melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada pengurus, merealisasikan program pelatihan yang telah direncanakan, serta mempercepat proses penyelesaian legalitas dan administrasi BUM Desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mendorong pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pengurus BUM Desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Jesica Aprilliana Clara

Nomor Induk Mahasiswa : E1031221052

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain serta sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 26 April 2026
Yang Membuat Pernyataan



Jesica Aprilliana Clara
NIM E1031221052

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

(Filipi 4:13)

Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Marselinus Pawin dan Ibu Florentina Dison, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang yang tulus, serta dukungan dan pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang selalu menguatkan saya, bahkan di saat saya merasa lelah dan hampir menyerah. Karya sederhana dan gelar ini saya persembahkan untuk Bapak dan Mama, sebagai wujud terima kasih saya atas peran dan perjuangan kalian yang luar biasa dalam hidup saya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi mama dan bapak.
2. Kakak, Abang dan Adik saya tercinta, Marceltina Dewi, Albertus Riski, dan Gracia Novena Setya Wati, yang selalu memberi semangat, dukungan, doa, serta kebersamaan yang begitu berarti. Terima kasih atas setiap motivasi, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Kalian telah menjadi tempat berbagi cerita, pendengar setia dalam setiap keluh kesah, serta penguat

di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi alasan saya untuk mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul: "Analisis Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa Jaya Mulya Abadi di Desa Sukamulya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau" ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menulis skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dosen Pembimbing Akademik (PA), sekaligus Dosen Penguji Pendamping yang sudah memberi saran dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Ir. Hj Ida Rochmawati, M.Si. Selaku Pembimbing Utama yang telah membantu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Ade Risna Sari, S.H, M.Si. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dr. Pardi, S.Sos, M.AB. Selaku Pembahas Utama yang telah banyak memberikan saran dan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
7. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam masa perkuliahan.
8. Pemerintah Desa Sukamulya, Pengurus BUM Desa Jaya Mulya Abadi, serta Masyarakat Desa Sukamulya yang menjadi informan pada penelitian ini.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang diberikan dengan tulus selama proses penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat menjadi amal kebaikan yang membawa manfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 23 April 2026

Jesica Aprilliana Clara
NIM. E1031221052

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACK ii
RINGKASAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR BAGAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 9
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat praktis 11
1.6.2 Manfaat Teoritis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1 Definisi Konsep 14
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa 14
2.1.2 Pemerintah Desa 15
2.1.3 Penggerak 16
2.1.4 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 17
2.2 Teori 18
2.2.1 Fungsi Pemerintahan 18
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 21

2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Pertanyaan Penelitian..... 30
BAB III METODE PENELITIAN..... 31
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian..... 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian..... 34
3.3.1 Lokasi Penelitian..... 34
3.3.2 Waktu Penelitian..... 34
3.4 Subjek dan Objek Penelitian..... 35
3.4.1 Subjek Penelitian 35
3.4.2 Objek Penelitian..... 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Alat Pengumpulan Data..... 38
3.7 Teknik Analisis Data 40
3.8 Keabsahan Data 41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 44
4.1 Sejarah Desa Sukamulya 44
4.2 Kondisi Geografis..... 47
4.3 Mata Pencaharian Masyarakat..... 49
4.4 Potensi Desa 51
4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa..... 52
4.6 Visi dan Misi 54
4.7 Gambaran Umum BUM Desa Jaya Mulya Abadi 56
4.7.1 Jenis Usaha BUM Desa 58
4.8 Gambaran Pengelolaan BUM Desa..... 60
4.8.1 Tugas dan Kewajiban Kepengurusan..... 60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
5.1 Deskripsi Hasi Penelitian..... 63
5.2 Analisis Fungsi Pemerintah Desa..... 71
BAB VI PENUTUP 96
6.1 Kesimpulan..... 96

6.2 Saran 97
6.3 Keterbatasan Penelitian 98
DAFTAR PUSTAKA 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rancangan RPJM Desa Sukamulya 5

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan 21

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 35

Tabel 4. 1 Jabatan Kepala Desa Sukamulya 45
Tabel 4. 2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukamulya 49
Tabel 4. 3 Potensi Desa Sukamulya 51
Tabel 4. 4 Struktur Kepengurusan BUM Desa Jaya Mulya Abadi 57
Tabel 4. 5 Jenis Usaha BUM Desa Jaya Mulya Abadi 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Surat Keputusan Kepala Desa Sukamulya 2
Gambar 1. 2 Status Pendaftaran BUM Desa Jaya Mulya Abadi..... 3

Gambar 4. 1 Kantor Desa Sukamulya..... 46
Gambar 4. 2 Peta Desa Sukamulya 48
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 53

Gambar 5. 1 Akta Notaris Pendirian Badan Usaha Milik Desa..... 63
Gambar 5. 2 AD/ART BUM Desa Jaya Mulya Abadi..... 64
Gambar 5. 3 Kantor BUM Desa Jaya Mulya Abadi 65
Gambar 5. 4 Berita Acara Penyetaan Modal..... 65
Gambar 5. 5 Musyawarah Desa Pembentukan BUM Desa Jaya Mulya Abadi 66
Gambar 5. 6 Kegiatan Usaha Penanaman Jagung..... 68
Gambar 5. 7 Usaha Pemotongan Ayam 69
Gambar 5. 8 Penyertaan Modal dari BUM Desa Kepada Mitra Kerja 76
Gambar 5. 9 Status Pendaftaran BUM Desa Jaya Mulya Abadi..... 92

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa pada era otonomi desa semakin menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal melalui lembaga desa, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Negara telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengelola BUM Desa sebagai lembaga sosial dan komersial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Secara nasional, BUM Desa telah berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang penting, namun berbagai laporan menunjukkan masih banyak BUM Desa yang hanya terbentuk di atas kertas. Fenomena stagnasi ini umumnya disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah desa dalam menggerakkan kelembagaan, kurangnya pembinaan terhadap pengurus, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia desa. Kesenjangan antara mandat regulasi dan kondisi faktual menjadi persoalan yang perlu dicermati secara serius.

Pada level daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui RPJMD 2025-2029 menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan BUM Desa sebagai salah satu fokus pembangunan daerah. Dalam Satu Data Indonesia tahun 2024 menunjukkan terdapat 819 BUM Desa di Provinsi Kalimantan Barat, dan 24 di antaranya berada di Kabupaten Sanggau serta telah terverifikasi badan hukum. Namun, laporan RRI Entikong pada Mei 2025 mengungkapkan bahwa belum semua desa di Kabupaten Sanggau memiliki BUM Desa yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Tenaga Ahli Kementerian Desa untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PM-Pemdes) Kabupaten Sanggau, Marga Suryani, menjelaskan bahwa baru 100 BUM Desa yang telah berbadan hukum dan produktif, 40 BUM Desa sedang dalam proses pendaftaran, dan 23 desa belum menyampaikan laporan kemajuan pembentukan BUM Desa. Beberapa desa bahkan menghadapi kendala sumber daya manusia, termasuk keengganan warga untuk menjabat sebagai Direktur BUM Desa karena khawatir mengelola anggaran. Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sanggau masih menghadapi tantangan dalam mekanisme pembentukan BUM Desa yang sah dan operasional.

Gambar 1. 1 Surat Keputusan Kepala Desa Sukamulya



KABUPATEN SANGGAU
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKA MULYA
KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS BUMDes
JAYA MULYA ABADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKA MULYA

Sumber: Arsip Sekretaris Desa Sukamulya, 2025

Desa Sukamulya merupakan salah satu desa di kabupaten Sanggau yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sudah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pembentukan BUM Desa Jaya Mulya Abadi pada 5 Maret 2025. SK tersebut menetapkan struktur organisasi lengkap, termasuk penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, dan bendahara. Dengan terbitnya SK Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2025, BUM Desa Jaya Mulya Abadi telah sah secara hukum dan memenuhi ketentuan administratif.

Gambar 1. 2 Status Pendaftaran BUM Desa Jaya Mulya Abadi



No	Nama	Provinsi	Kab / Kota	Kecamatan	Desa	Status
1	BUM DESA JAYA MULYA ABADI SUKA MULYA	KALIMANTAN BARAT	SANGGAU	PARINDU	SUKA MULYA	Perbaikan Dokumen Badan Hukum

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Sumber: Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa, 2026

Berdasarkan informasi yang akses dari Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa pada tahun 2026, BUM Desa Jaya Mulya Abadi telah tercantum dalam sistem dengan status *'perbaikan dokumen badan hukum'*. Status tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan proses pendaftaran BUM Desa, meskipun belum sampai pada tahap *terferifikasi badan hukum*. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses administrasi dan penguatan legalitas BUM Desa masih berada dalam tahap penyempurnaan dan belum sepenuhnya tuntas.

Dalam dokumen Anggaran Dasar (AD) BUM Desa Jaya Mulya Abadi telah ditetapkan jenis-jenis usaha yang akan dijalankan, meliputi:

a) bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
b) perdagangan besar dan eceran;
c) pengangkutan dan pergudangan;
d) informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, hingga saat ini BUM Desa Jaya Mulya Abadi baru menjalankan usaha di bidang peternakan, yaitu melalui kerja sama dengan satu pengusaha peternakan dan pemotongan ayam yang berada di Desa Sukamulya. Selain itu, BUM Desa Jaya Mulya Abadi juga tengah mengembangkan usaha di bidang pertanian melalui kegiatan penanaman jagung. Namun hingga Desember 2025, usaha tersebut belum memberikan hasil karena masih dalam tahap proses tanam dan belum memasuki masa panen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BUM Desa Jaya Mulya Abadi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya merealisasikan jenis usaha sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa. Terbatasnya jenis usaha yang dijalankan serta belum optimalnya hasil usaha yang dikembangkan mengindikasikan belum maksimalnya fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan BUM Desa agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Terbatasnya jenis usaha yang dijalankan serta belum optimalnya hasil usaha yang dikembangkan mengindikasikan belum maksimalnya fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan BUM Desa agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan

pembentukannya. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai penasihat BUM Desa yang memiliki tugas memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUM Desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUM Desa. Dengan demikian, pemerintah desa melalui peran kepala desa sebagai penasihat memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan BUM Desa dapat berkembang dan dikelola secara efektif sesuai dengan rencana usaha yang telah ditetapkan. Namun, kondisi yang terjadi di Desa Sukamulya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi agar dapat beroperasi secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Tabel 1. 1 Rancangan RPJM Desa Sukamulya

Nama Program/Kegiatan		Perkiraan Volume	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
			Jumlah (Rp)	Sumber
e	**Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**			
1	Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah - Pelatihan bagi pelaku usaha produktif di desa	15 Kali	100.000.000	APBDES
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelaku Usaha Micro - Pengadaan sarana dan prasarana produksi bagi pelaku usaha	1 Paket	210.000.000	APBDES
f	**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**			
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	3 Kali	30.000.000	APBDES

Nama Program/Kegiatan		Perkiraan Volume	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
			Jumlah (Rp)	Sumber
	- Pelatihan manajemen dan pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama			
2	Penyertaan BUM Desa - Penyertaan modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama	3 Kali	200.000.000	APBDES
g	**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**			
1	Pemeliharaan Kios Milik Desa - Pemeliharaan Gedung Sentra Produksi Kelompok Usaha Bersama	1 Kali	100.000.000	APBDES/ APBD
2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha ekonomi Produktif - Pelatihan manajemen dan pengembangan bagi kelompok usaha mandiri dan bersama - Memfasilitasi dan pendampingan kelompok usaha mandiri dan bersama	15 Kali 10 Kali	75.000.000 50.000.000	APBDES APBDES/ APBD
Jumlah			765.000.000	

Sumber: Arsip Sekretaris Desa Sukamulya, 2025

Lebih lanjut, dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDes) Desa Sukamulya telah mencantumkan program pengembangan BUM Desa, termasuk pelatihan pengurus dengan anggaran sebesar 30 juta rupiah dan penyertaan modal sebesar Rp200.000.000. Program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendorong penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, secara perencanaan, Desa Sukamulya telah memenuhi prasyarat untuk mengembangkan BUM Desa secara sistematis.

Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa BUM Desa Jaya Mulya Abadi belum beroperasi dengan optimal. Unit usaha yang direncanakan

dalam Anggaran Dasar (AD) BUM Desa belum sepenuhnya berjalan. Program pelatihan yang tercantum dalam RPJMDes belum direalisasikan, sehingga tujuan pendirian BUM Desa sebagai instrumen peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan ekonomi desa belum tercapai secara maksimal.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan nyata antara regulasi nasional, kebijakan daerah, dokumen perencanaan desa, legalitas kelembagaan, dan realitas yang terjadi di lapangan. Pada satu sisi, desa telah menyusun rencana, menetapkan struktur, dan mengalokasikan anggaran; namun pada sisi lain, pemerintah desa belum menjalankan fungsi sebagai penggerakan awal, pembinaan, fasilitasi sarana, maupun pengawasan terhadap pengurus BUM Desa. Kesenjangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan pada aspek tata kelola pemerintah desa dalam menggerakkan BUM Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, belum beroperasi secara optimal BUM Desa Jaya Mulya Abadi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam aspek pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat melalui instrumen BUM Desa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa pada Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) menegaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa sendiri terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati tersebut menegaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa, serta memberdayakan masyarakat.

Dengan demikian, belum optimalnya aktivitas BUM Desa Jaya Mulya Abadi di Desa Sukamulya mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa, khususnya dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat melalui instrumen BUM Desa. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan menggerakkan BUM Desa tidak hanya sebatas pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga mencakup upaya pemerintah desa dalam melakukan pembinaan terhadap pengurus BUM Desa, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung, memberikan arahan dan dukungan kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dilakukan penelitian untuk mengkaji fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi agar mampu berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Sukamulya dalam memperbaiki tata kelola BUM Desa serta memberikan analisis yang komprehensif mengenai

bagaimana fungsi pemerintah desa dijalankan dalam proses penggerakan BUM Desa, mulai dari tahap pembentukan, pembinaan kelembagaan, fasilitasi sarana dan prasarana, realisasi penyertaan modal, hingga pengawasan terhadap kinerja pengurus BUM Desa.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran empiris mengenai sejauh mana pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Sukamulya dalam memperkuat tata kelola BUM Desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada umumnya, identifikasi masalah adalah pernyataan yang mempertanyakan sesuatu atau beberapa variabel yang ada dalam suatu fenomena. Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan data hasil observasi di Desa Sukamulya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BUM Desa Jaya Mulya Abadi belum optimal dalam menjalankan unit usaha meskipun telah ditetapkan secara legal melalui SK Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pembentukan BUM Desa Jaya Mulya Abadi pada 5 Maret 2025.
2. Pemerintah Desa Sukamulya belum melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus BUM Desa, termasuk pelatihan yang direncanakan dalam dokumen RPJMDes.

3. Proses administrasi dan legalitas BUM Desa Jaya Mulya Abadi dalam Sistem Informasi Desa (SID) Kemendesa masih berada pada tahap dokumen dalam perbaikan dan belum sampai pada tahap terferifikasi badan hukum, yang menunjukkan bahwa proses administrasi dan legalitas belum sepenuhnya tuntas oleh pemerintah desa.

1.3 Fokus Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2025), Fokus penelitian merupakan batasan masalah. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasebilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jaya Mulya Abadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, khususnya fungsi kepala desa sebagai penasehat dalam menggerakkan BUM Desa.

1.4 Rumusan Masalah

Menurut (Sugiyono, 2025), rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa) Jaya Mulya Abadi Di Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau?

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2025), Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum di ketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi Di Desa Sukamulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah segala bentuk kegunaan atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut (Sugiyono, 2025)**,** manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis yang berhubungan dengan pengembangan teori dan keilmuan, serta manfaat praktis yang berhubungan dengan penerapan hasil penelitian untuk memecahkan masalah nyata.

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang dapat digunakan secara langsung oleh pihak terkait untuk meningkatkan kinerja, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan. Menurut Arikunto (2014)**,** manfaat praktis merupakan

kegunaan nyata dari hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh individu, organisasi, maupun pemangku kebijakan.

Mengacu pada pengertian tersebut, manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Pemerintah Desa Sukamulya

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Sukamulya mengenai pelaksanaan peran dalam menggerakkan BUM Desa Jaya Mulya Abadi, termasuk aspek yang belum berjalan optimal.
2. Menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk memperbaiki strategi pembinaan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan BUM Desa agar dapat beroperasi secara efektif sesuai ketentuan regulasi.

b. Pemerintah Kabupaten Sanggau

1. Memberikan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembentukan dan pembinaan BUM Desa, khususnya pada desa-desa yang memiliki BUM Desa tetapi belum beroperasi dengan optimal.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam rangka mengoptimalkan peran desa dalam menggerakkan BUM Desa.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang ditujukan untuk memperkaya, mengembangkan, atau memperjelas teori dan konsep ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai fungsi pemerintah desa dalam

menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai fungsi-fungsi pemerintah yang mencakup empat fungsi utama, yaitu Fungsi Pengatur (*Regulation*), Fungsi Pelayanan (*Public Service*), Fungsi Pemberdayaan (*Empowering*), dan Fungsi Pembangunan (*Development*). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.